

# KEMAMPUAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEPOTONG KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG

Oleh:  
**AFRIANUS CHANDRA**  
NIM. E42012037

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : [candra8800@gmail.com](mailto:candra8800@gmail.com)

## Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di desa Sepotong, Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Skripsi ini ditulis berdasarkan masalah yang ada di lapangan yaitu kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi belum optimal yang diindikasikan karena pemerintah desa kurang menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan teori kemampuan model Steers.

Penyebab kemampuan perangkat desa Sepotong dalam pelaksanaan tugas administrasi belum optimal adalah pendidikan beberapa perangkat desa masih rendah; perangkat desa tidak pernah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah; pengalaman perangkat desa belum dimanfaatkan dengan optimal. Adapun saran penelitian ini adalah perekrutan perangkat desa harus sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditentukan; pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah desa berkaitan dengan waktu pelatihan perangkat desa; perangkat desa harus kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kemampuan diri.

Kata-kata Kunci: Kemampuan, Administrasi dan Optimal

## The Capability of Village Officers on Discharge Governance Administration at Sepotong Village Sungai Laur Subdistrict Ketapang Regency

## Abstarct

This undergraduate thesis is aimed to describe and analyze ability of village officers on discharge governance administration at Sepotong village Sungai Laur subdistrict Ketapang regency. This undergraduate thesis is based on matter in the location that is capability of village officers on discharge governance administration were not optimal that indicated with government of village did not run their duty function. This research used the capability theory by Steers models.

The causation of capability of Sepotong village officers not optimal on discharge governance administration are the education of several village officers are still low; the village officers also never attended training provided by the local government; experience of the village officers that has not been used optimally. The suggestion of this research is the recruitment of village officers should be comply with educational standards that have been determined; the local government must coordinate with the village government with regard to time training of village officers; the village officers must be creative and innovative ways to improve themselves.

*Keywords: Capability, Administration and Optimal*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang multidimensional secara pengelolaannya melibatkan segenap perangkat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau perangkat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Sudah sepantasnya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan yang paling rendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintahan presiden Jokowi memprioritaskan desa sebagai program pembangunan nasional yang tertuang dalam program nawacitanya. Dengan diprioritaskannya desa sebagai program pembangunan tersebut maka perhatian pemerintah terhadap desa sudah terlihat.

Berkaitan dengan diprioritaskannya desa sebagai pembangunan nasional oleh pemerintah, maka semakin banyak pula aspek-aspek atau bidang-bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan desa tersebut, salah satu aspek yang

terlebih dahulu perlu dibangun untuk menunjang keberhasilan kegiatan pemerintah desa adalah peningkatan sumber daya perangkat pemerintah desa dalam mengelola administrasi pemerintahan yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta perangkatnya adalah penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Oleh karena itu diperlukan aparatur pelaksana yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, sebagai konsekuensi logis dari pada usaha penyempurnaan aparatur pemerintahan maka akan dapat menambah kemampuan aparatur pemerintah dalam melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan desa diseragamkan dan mengindahkan keragaman keadaan desa dan adat istiadat yang masih berlaku sehingga desa tidak kehilangan ciri khas desa. Desa diarahkan pada usaha memperkuat kedudukan pemerintahannya agar mampu menggerakkan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan penyelenggaraan administrasi dengan baik agar desa yang dipimpin dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional.

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan

administrasi. Oleh karena itu pemerintah kecamatan sangat dituntut untuk turut berperan aktif dalam usaha pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan perangkat pemerintah desa, sehingga akan terwujud pelaksanaan administrasi yang tertib dan dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan di wilayah pedesaan.

Keberadaan perangkat desa yang juga di serahi tugas dibidang administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, Suryaningrat (1992:108) mengemukakan bahwa “desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari Desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”. Kemudian Wiludjeng (2007:76)

berpendapat bahwa “informasi akan bermanfaat jika data tersebut akurat, lengkap, relevan, tepat waktu, dapat diukur dan dapat di buktikan”. Dengan demikian perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi sebenarnya dilapangan, menurut pengamatan peneliti, perangkat desa Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang sebagai tempat penelitian ini memiliki 1 (satu) orang kepala desa, 1 (satu) orang sekretaris desa, 2 (dua) orang kepala dusun dan 3 (tiga) orang kepala urusan (kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum) serta 1 (satu) staf desa.

## **2. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada kemampuan yang dimiliki perangkat desa dalam melaksanakan tugas administrasi di desa Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang.

## **3. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan di desa Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang terkait dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman?

## **4. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pendidikan perangkat desa yang berkaitan dengan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang;
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelatihan perangkat desa yang berkaitan dengan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang; serta
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengalaman perangkat desa yang berkaitan dengan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa

Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang.

## 5. Manfaat Penelitian

### 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada ilmu pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

### 2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi yang bermanfaat bagi:

- a) Pemerintah kabupaten Ketapang;
- b) Pemerintah kecamatan Sungai Laur
- c) Pemerintah desa Sepotong;
- d) Masyarakat desa Sepotong;
- e) Badan permusyawaratan desa (BPD) desa Sepotong.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Konsep Teori

Menurut Steers (dalam Rasyid, 1992:6) “kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari

pendidikan, latihan dan pengalaman”. Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang dalam hal ini perangkat desa dapat di ukur melalui:

- 1) Tingkat pendidikan aparatur,
- 2) Jenis pelatihan yang didapat dan
- 3) Pengalaman yang dimilikinya.

Kemudian jika telah di ukur menggunakan tiga indikator tersebut di atas maka kemampuan yang dimiliki perangkat desa akan di analisis berdasarkan tingkat keberhasilan melaksanakan suatu pelayanan baik itu pelayanan administrasi maupun pelayanan non-administrasi.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan jawaban dan menjelaskan permasalahan yang diteliti guna menemukan pemecahan masalah yang diteliti. Sedangkan metode merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian tentang kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa Sepotong menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran serta fakta-fakta sesuai keadaan dan objek penelitian yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. Penelitian yang berjudul Kemampuan Perangkat Desa dalam

Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2010:230), mengatakan “metode penelitian yang meliputi pengumpulan data dengan mendeskripsikan semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan menyangkut keadaan pada saat penelitian”.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menjelaskan data-data yang ada, peneliti akan menjelaskan setiap indikator dari kemampuan perangkat desa. Penelitian terhadap kemampuan dianggap penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Analisis kemampuan adalah upaya yang digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja agar bisa diterapkan dengan lebih terarah dan lebih sistematis. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari perangkat desa adalah sebagai berikut.

#### **1. Pendidikan**

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor terpenting

yang tidak dapat dipisahkan pengaruhnya terhadap kinerja perangkat, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat pemahaman akan tugas dan fungsi semakin besar. Dengan kata lain, bahwa faktor pendidikan yang rendah dapat menghambat seseorang untuk dapat melaksanakan tugas dengan optimal. Pendidikan formal yang di miliki oleh seorang perangkat desa sangat di perlukan guna menunjang semua pekerjaan yang akan di kerjakannya. Dengan pendidikan tersebut seseorang akan mampu melaksanakan segala tugas yang telah menjadi tanggung jawab yang di berikan. Sebagai seorang aparatur pemerintahan perangkat desa dituntut untuk terus mengembangkan diri dengan modal pendidikan yang mereka miliki sehingga ketika melaksanakan suatu pekerjaan akan dapat dipertanggung jawabkan dan mencapai hasil yang optimal. Namun pada kenyataannya, beberapa perangkat desa tidak memanfaatkan pendidikan sebagai modal untuk mengembangkan potensi yang ada. Sehingga yang terjadi hanyalah ketidak pahaman terhadap tugas-tugas yang di miliki dan cenderung tugas tersebut tidak terlaksana dengan optimal. Begitu juga yang terjadi dengan perangkat desa yang ada di desa Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang. Padahal jika dilihat dari tingkat pendidikannya beberapa perangkat desa

sudah memenuhi syarat sebagaimana telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang desa nomor 6 tahun 2016.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, syarat untuk menjadi perangkat desa harus berpendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA). Namun pada kenyataannya masih ada perangkat desa Sepotong yang belum memenuhi syarat tersebut. Hal ini dapat di lihat dari hasil penelitian melalui data dokumentasi di lapangan yang mana ada lima (5) orang perangkat desa yang berpendidikan SMA sedangkan yang lain hanya berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Ini menunjukkan desa Sepotong belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku.

## **2. Pelatihan**

Salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di desa adalah dengan cara memberikan pelatihan. Karena dengan memberikan pelatihan maka setidaknya pengetahuan dan keterampilan perangkat desa akan meningkat sehingga diharapkan akan berpengaruh pada hasil kerja yang mereka peroleh di kemudian hari. Selain itu juga dampak dari pelatihan tersebut juga akan mengarah pada keberhasilan perangkat desa dalam melaksanakan tugas

administrasi di mana mereka bertugas. Oleh karena itu diharapkan pemerintah terus memberdayakan dan meningkatkan kualitas perangkat desa melalui cara tersebut.

Pendidikan dan Pelatihan merupakan upaya untuk memberdayakan perangkat desa, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang. Dengan mengikuti pelatihan tersebut diharapkan nantinya dapat menjadikan perangkat desa terampil sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa guna melayani kepentingan masyarakat. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesi dan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki.

Namun pada kenyataannya, setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan ternyata selama ini perangkat desa Sepotong belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak kabupaten. Hal ini sangat disayangkan, karena ada kesempatan untuk para perangkat desa mengembangkan kemampuan melalui pelatihan tersebut namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya kepala desa mampu memberikan dorongan kepada perangkat-perangkatnya agar mau berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat bermanfaat tersebut. Selain itu kepala desa juga seharusnya memiliki wewenang untuk melakukan sanksi kepada mereka yang tidak mau mengikuti arahan, karena apabila telah terpilih menjadi perangkat desa berarti mereka harus menerima segala konsekuensi yang ada.

### **3. Pengalaman**

Pengalaman adalah salah satu faktor penting yang menentukan terampil atau tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan berbekal pengalaman seseorang mendapatkan nilai tambah untuk dipercayakan dalam hal pelaksanaan tugas. Karena dengan pengalaman tersebut seseorang akan lebih mudah untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berat sekalipun. Seperti budaya kita yang memandang bahwa

pengalaman adalah guru yang paling baik. Artinya faktor pengalaman juga tidak bisa dipisahkan dari seseorang yang memiliki kematangan dalam berorganisasi, sehingga dengan kematangannya tersebut akan mengurangi suatu kesalahan dalam pekerjaan. Demikian juga halnya dengan apa yang terjadi dengan perangkat desa. Karena pengalaman yang dimiliki perangkat desa sangat diperlukan agar ketika melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi.

Pengalaman berorganisasi tentu dapat dijadikan modal bagi perangkat desa dalam melaksanakan suatu pekerjaan, Sehingga mereka dapat melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa. Selain itu juga mereka dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu perangkat desa harus benar-benar memahami segala peraturan dan konsekuensi seseorang yang berkecimpung di pemerintahan. Dengan begitu perangkat desa juga dapat memahami bagaimana bekerja di sebuah organisasi pemerintahan desa sehingga dapat melanjutkan apa yang memang sudah baik dan memperbaiki apa yang belum baik.

Untuk melihat bagaimana tingkat pengalaman berorganisasi perangkat desa Sepotong, peneliti melakukan penelitian di lapangan dan ternyata perangkat desa Sepotong diantaranya sudah ada yang berpengalaman dalam mengelola organisasi pemerintahan desa selain itu juga ada yang baru pertama kali berkecimpung di dunia pemerintahan desa. Namun dari hasil penelitian ini, perangkat desa yang sudah pernah menjadi bagian dari pemerintahan desa tersebut belum memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa. Mereka cenderung hanya melakukan pekerjaan dengan cara lisan dan hanya mengandalkan staf desa dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Sehingga semua pekerjaan yang bersifat administratif dilakukan staf desa.

Berikut adalah hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti guna melihat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh perangkat desa Sepotong:

### **1. Pencatatan atau Register**

Register adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi melalui pencatatan-pencatatan di dalam format yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian (kaji dokumen) menunjukkan bahwa

pelaksanaan tugas pemerintahan Desa Sepotong dalam pencatatan atau pengisian buku-buku register tersebut, dapat dinilai "kurang optimal", bahkan cenderung "tidak optimal". Hal tersebut terlihat dari sembilan buku register yang harus diisi oleh perangkat Desa, ternyata yang terisi hanya 5 buku, yaitu : Buku Agenda, Buku Perangkat, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Induk Penduduk dan Buku Kas Pembantu.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa buku yang terisi tersebut, datanya tidak akurat dan tidak lengkap. Rincian tentang ketidaklengkapan pengisian buku-buku tersebut, sebagai berikut:

#### **a. Buku Agenda**

Buku Agenda adalah buku tentang pencatatan surat-surat masuk dan keluar. Dalam penelitian ini tercatat 14 surat masuk dan 8 surat keluar. Dan penelitian yang dilakukan pada buku agenda terlihat bahwa 10 kolom yang tersedia pada agenda surat masuk ternyata kolom 5, 6, 7, 10 yaitu : nama instansi yang mengirim, penanggung jawab pengelola dan kolom keterangan tidak terisi. Demikian pula dengan Agenda Surat Keluar, ternyata 10 kolom yang tersedia ternyata tidak terisi.

Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengisian buku agenda pada bagian Surat masuk dan Surat keluar, dalam pengisian kolom-

kolomnya tidak terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan.

b. Buku Data Perangkat Pemerintah Desa

Buku Perangkat adalah buku tempat pencatatan berbagai informasi tentang keadaan perangkat pemerintah desa. Dari 11 kolom yang tersedia, ternyata yang terisi hanya 5 kolom, sedangkan yang tidak terisi sebanyak 5 kolom, yaitu ; kolom NIP (untuk SEKDES), Tempat dan tanggal lahir, Pangkat/Golongan, dan kolom keterangan.

c. Buku Keputusan Pemerintah Desa

Buku Keputusan adalah buku tempat mencatat data/informasi mengenai, kebijakan atau keputusan pemerintah desa, sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dari 12 kolom yang tersedia dalam register tersebut, terisi hanya 6 kolom, yaitu : Kolom Nomor Urut, Uraian Singkat Keputusan, Keputusan Rapat, Tanggal Rapat, Pimpinan Rapat dan Tanggal Pengesahan. Sedang kolom yang tidak terisi sebanyak 6 kolom, yaitu : Kolom Peserta Rapat, jabatan, Jenis Keputusan, Hasil Keputusan setuju atau tidak setuju dan Kolom Kesimpulan.

d. Buku Data Penduduk

Buku data penduduk adalah buku tempat mencatat seluruh penduduk yang menjadi warga di desa tersebut, serta berbagai karakteristik yang melingkupi,

setiap individu warga tersebut. Dari 19 kolom yang tersedia pada daftar register tersebut, yaitu secara berturut-turut antara lain kolom nomor urut, nama lengkap/panggilan, jenis kelamin, status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dapat membaca huruf, kewarganegaraan, alamat lengkap, kedudukan dalam keluarga, nomor KTP, nomor kartu keluarga dan kolom keterangan. Ternyata masih banyak kolom pengisian yang tidak terisi seperti antara lain status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, nomor KTP dan nomor Kartu Keluarga. Selain dari itu jumlah penduduk yang tercatat dalam buku ini tidak seluruhnya terdaftar. Hal ini terlihat bahwa dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2010 sebanyak 1296 jiwa yang tercatat pada tahun 2016 juga sama 1296 jiwa. Artinya tidak ada perubahan selama rentang waktu enam tahun. Selain itu tidak ada laporan penduduk setiap bulannya atau buku rekapitulasi penduduk akhir bulan sehingga berpengaruh pada buku-buku penduduk lainnya seperti tidak terisinya buku data mutasi penduduk, dan buku data penduduk sementara.

e. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum adalah buku tempat pencatatan setiap kegiatan penerimaan rutin dan pembangunan serta pengeluaran

dan pembangunan setiap hari. Buku Kas umum berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan dan pengeluaran setiap hari terhadap keadaan uang tunai yang ada pada kas desa. Dalam buku tersebut terdiri dari 5 kolom pada bagian penerimaan dan 5 kolom pada bagian pengeluaran. Dari kaji dokumen yang penulis lakukan yang terisi masing-masing 5 kolom, yaitu : kolom tanggal penerimaan, uraian penerimaan, nomor urut kode pos anggaran, jumlah anggaran dan bukti anggaran begitu juga pada kolom penerimaan yang terisi yaitu : Pengeluaran Rutin, Kolom Tanggal Pengeluaran, kolom nomor urut, Kode Pos Anggaran, Jumlah Anggaran Pengeluaran dan Buku Pengeluaran Anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan di atas, perangkat desa Sepotong belum mampu untuk melaksanakan semua tugas administrasi yang ada di pemerintahan desa dengan optimal. Sehingga buku-buku administrasi yang menjadi sumber informasi bagi pemerintah guna menyiapkan program-program tidak dapat memberikan informasi yang akurat yang di akibatkan ketidakmampuan perangkat desa dalam menyediakan dan memberikan informasi yang akurat.

## **2. Pembuatan Catatan Monografi**

Pembuatan dan pencatatan Monografi merupakan salah satu tugas dari perangkat

desa. Tugas tersebut perlu dilaksanakan dan selanjutnya untuk ditampilkan di dalam ruang kantor desa. Hal ini penting mengingat papan monografi tersebut dapat memberikan informasi dan data kepada pihak luar atau masyarakat umum tentang keadaan wilayah dengan berbagai potensinya. Namun dari hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut tidak terealisasi secara baik. Hal ini terlihat bahwa tidak ada papan monografi di kantor desa tersebut. Bahkan ketika peneliti menanyakan kepada salah satu kepala wilayah yaitu kepala dusun Balai Keramat, beliau mengatakan kantor desa tidak digunakan sebagai kantor bagi kepala desa melainkan digunakan sebagai gedung Sekolah Dasar (SD) negeri yang belum memiliki gedung.

Melihat kondisi yang demikian peneliti menyimpulkan bahwa desa Sepotong merupakan salah satu desa induk yang belum mampu menjadi desa yang dapat di contoh bagi desa desa pemekaran, karena menurut peneliti pengelolaan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia hingga sumber daya seperti sarana dan prasarana yang seharusnya digunakan sebagai tempat mereka untuk melakukan semua kegiatan pemerintahan tidak dapat di manfaatkan dengan optimal.

### 3. Penyimpanan Dokumen atau Pengarsipan

Penyimpanan dokumen-dokumen atau arsip secara baik adalah salah satu tugas perangkat desa. Dengan penyimpanan arsip yang baik dapat membantu perangkat desa menemukan kembali data tersebut jika dibutuhkan. Namun dari pengamatan penulis, ternyata tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya arsip dan atau register-register yang tidak dipaparkan sebelumnya pada kantor desa. Akan tetapi daftar register dimaksud tersimpan di rumah Sekretaris Desa, karena seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kantor desa tidak dipergunakan sebagai kantor untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi desa tetapi digunakan sebagai gedung sekolah dasar sementara.

Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, khususnya uraian tentang kondisi sebenarnya pelaksanaan tugas perangkat desa dalam arti sempit, yang meliputi : pencatatan register, pembuatan dan pencatatan monografi dalam, dan penyimpanan dokumen/arsip, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan tugas dimaksud dapat dinilai kurang optimal bahkan cenderung tidak optimal. Hal tersebut terlihat dari tidak akuratnya data yang disajikan dan tidak terealisasinya seluruh tugas yang telah ditetapkan.

Bahkan data-data yang ditampilkan sudah tidak pernah diperbaharui lagi sehingga tidak ada perubahan data dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2016.

### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa Sepotong kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari sisi pendidikan, ternyata beberapa orang dari perangkat desa Sepotong belum memiliki pendidikan yang cukup sehingga tidak memenuhi syarat yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena perangkat desa Sepotong di rekrut sebelum undang-undang nomor 6 tahun 2014 berlaku yaitu berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan perangkat desa berpendidikan minimal SMP.
2. Jika dilihat dari sisi pelatihan, ternyata perangkat desa Sepotong

belum pernah mengikuti pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten Ketapang. Sehingga perangkat desa Sepotong belum memiliki keterampilan yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintahan.

3. Jika dilihat dari sisi pengalaman, beberapa dari perangkat desa Sepotong sudah memiliki pengalaman menjadi bagian dari pemerintahan desa namun pada kenyataannya belum mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan dengan optimal sesuai dengan format yang telah ditentukan.

## E. SARAN

Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di desa Sepotong, khususnya tugas-tugas administrasi pemerintahan desa, ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan perekrutan perangkat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa diharapkan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan melakukan

pengawasan yang lebih ketat terutama dalam hal standar pendidikan. Dengan harapan perangkat desa yang terpilih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melaksanakan tugas dengan optimal.

2. Berkaitan dengan kegiatan pelatihan-pelatihan yang di berikan bagi perangkat desa, diharapkan pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan agar dapat memilih waktu yang tepat. Sehingga perangkat desa dapat mengikuti kegiatan tersebut, terutama bagi perangkat desa yang berada di pedalaman. Dengan demikian di harapkan kemampuan perangkat desa akan bertambah. Selain itu juga pemerintah desa diharapkan dapat memberikan penghargaan non-materil maupun materil kepada perangkat desa yang melaksanakan kewajiban dengan baik dan memberikan sanksi yang tegas kepada perangkat desa yang melanggar.

3. Bagi perangkat desa yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi di desa diharapkan dapat mengaplikasikan dan membagi pengalaman tersebut kepada perangkat desa yang belum memiliki, sehingga dengan demikian diharapkan

tugas dan kewajiban sebagai aparat pemerintahan dapat di optimalkan. Selain itu, diharapkan perangkat desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal menambah pengetahuan diri berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa dengan cara membaca peraturan-peraturan maupun pedoman yang di berikan oleh pemerintah daerah.

4. melanggar.

## F. REFERENSI

- Afiffuddin. 2010. **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Bandung: Alfabeta
- Bouman, P.J.1971, **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: PT Rajawali.
- Bungin, B. 2007. **Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Prenada Media Group
- Emzir. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Furchan, Arif. 2011. **Pengantar Penelitian dalam Pendidikan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gibson, J.L. 1996. **Organisasi Dan Manajemen**, Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, Prasetya. 2006. **Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial**. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1993. **Pemerintahan dan Kepemimpinan**. Jakarta: Rajawali Press
- Lembaga Administrasi Negara. 1997. **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia**. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Mayor Polak, J.B.A.F. 1976. **Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas**. Jakarta: Bumi Aksara
- Mustafa, Delly. 2013. **Birokrasi Pemerintahan**. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy. J. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2011. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rasyid, M. 1992. **Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Perangkat Pemerintah**. Palu: Universitas Tadulako
- Saparin, Sumber. 1996. **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 1991. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Haji Masagung
- \_\_\_\_\_.1998. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabet
- \_\_\_\_\_.2011. **Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)**. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2012. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Suradinata, Ermaya. 1998. **Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Bandung: Ramadan

Suryaningrat, bayu. 1992. **Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan**. Jakarta: Ghalia Indonesia

Syafiie, Inu Kencana. 2003. **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia**. Bandung: PT. Bumi Aksara

\_\_\_\_\_. 2007. **Pengantar Ilmu Pemerintahan**. Bandung: Refika Cipta

Syarif, Roesli. 1991. **Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan**. Bandung: Bina Askara

Tambunan, T.T.H. 1996. **Perekonomian Indonesia**. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tjitoherianto, Prijono. 1993. **Pembangunan Sumberdaya Manusia**. Jakarta: Prisma

Tohardi, A. 2011. **Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan**. Pontianak: PRODI IP FISIP UNTAN

Widjaya, HAW. 2008. **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh**. Jakarta: PT. Rajawali Pers

Wijaya, Cece. 1991. **Manajemen Pemerintahan**. Jakarta: Rajawali Press.

Wiludjeng, Sri. 2007. **Pengantar Manajemen**. Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **Dokumen:**

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 Tentang Perlombaan Desa dan Kelurahan

Profil Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Tahun 2016  
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

#### **Sumber Lain:**

Ayok Fatnuriawan. 2014. **Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjark Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tahun 2014**. Malang: Universitas Negeri Malang

Crish Agusta Misa. 2015. **Kemampuan Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi di Kelurahan Maya Sopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang**. Pontianak: PRODI IP FISIP Untan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Afrianus Chandra  
NIM / Periode Lulus : E42012037 / 2016  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : candra8800@gmail.com / 085245968480

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEMAMPUAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEPOTONG KECAMATAN SUNGAI LAUR  
KABUPATEN KETAPANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui  
Ketua Pengelola Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

**Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A**  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : Oktober 2016

(Afrianus Chandra)